



PEMERINTAH KABUPATEN
BADUNG

BULETIN



EDISI PERTAMA
TAHUN
2018

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BADUNG**

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Atas Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sanghyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, BULETIN Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung tahun 2018 edisi Pertama dapat kami susun.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, maka telah dibentuk “Badan Penelitian Dan Pengembangan “ (BALITBANG) “ Pemerintah Kabupaten Badung, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung menyelenggarakan fungsi kelitbangan yang berwenang dan bertanggung jawab atas kegiatan kelitbangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pembuatan BULETIN Balitbang Kabupaten Badung ini dimaksudkan sebagai media informasi mengenai sebuah instansi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di Kabupaten Badung. Materi di dalamnya berisi tentang kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung, serta sajian materi – materi ilmiah dan praktis yang dapat memberi manfaat bagi para pembaca.

BULETIN ini merupakan penerbitan perdana sehingga tentu masih banyak kekurangannya. Untuk itu masukan, saran dan kritik dari para pembaca akan kami terima dengan senang hati.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya menerima BULETIN Balitbang Kabupaten Badung ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.

Om Shanti Shanti Shanti Om.

Mangupura, 21 Juni 2018
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Badung



(I Wayan Suambara, SH.,MM)
Pembina Utama Muda
NIP. 19631025 198810 1 002

Diterbitkan oleh:

Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Badung

Penanggung Jawab:

Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Badung

Redaktur:

Sekretaris
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Badung

Kepala Bidang Sosial, Ekonomi dan
Pemerintahan

Kepala Bidang Pembangunan, Inovasi
dan Teknologi.

Penyunting/Editor:

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Beserta Staff

Alamat:

Pusat Pemerintah Kabupaten Badung
“Mangupraja Mandala”
Jalan Raya Sempidi, Mengwi - Badung
Telp : (0361) 9009255
Fax : (0361) 9009255

Website:

www.balitbang.badungkab.go.id

E-Mail:

Balitbangbadungkab@gmail.com

Facebook:

<https://www.facebook.com/Balitbang-badungkab/>

Instagram:

[balitbangbadung](https://www.instagram.com/balitbangbadung)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
- Forum Kelitbangan Tahun 2018	1
- Pengembangan Pelayanan Kesehatan	3
Masyarakat Melalui Sistem Homecare	
- Pengembangan Produk Pertanian Bunga	5
Potong Sebagai Penunjang Kebutuhan Hotel Dan Restoran Kabupaten Badung	
- Peluang Investasi Di Bidang Perbankan	7
Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	
- Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan	10
Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Kabupaten Badung Yang Berkelanjutan	
- Reorientasi Paradigma Badan Litbang	13
Dari “Researc And Devel opment” Menjadi “Research For Development” (Kasus Program Prima Tani Menjadi Program Simantri)	
- Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi E-Kinerja	15
- Rapat Koordinasi Bersama Lembaga	16
Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	
- Kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementrian	17
Agama Provinsi Bali	
- Rapat Koordinasi Tim Kelitbangan	18
- Kepala Badan Penelitian Dan	19
Pengembangan Kabupaten Badung Mengunjungi Umkm Penghasil Virgin Coconut Oil	
- Kegiatan Mangupura Award	20
- Pembukaan Kegiatan Forum	21
Kelitbangan Kabupaten Badung Tahun 2018	
- Studi Kelayakan Investasi Pembangunan	22
Hotel Di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung	

DAFTAR ISI

- Kabupaten Badung Mengkaji Sistem Parkir Berbasis Teknologi 23
- Rapat Koordinasi Majelis Pertimbangan Kelitbangan Kabupaten Badung 24
- Penelitian Dampak Pemberian Hibah Uang Oleh Pemerintah 25
Kabupaten Badung Kepada Desa Adat
Dan Kelompok Masyarakat Di Kabupaten Badung
- Kajian Evaluasi Program Krama Badung Sehat (Kbs) Di Kabupaten Badung 26
- Forum Diskusi Tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Jfak) 27
- Focus Grup Discussion Program Keluarga Berencana (Kb Bali) 4 Anak 28
Sebagai Usaha Mempertahankan Kearifan Lokal
Di Kabupaten Badung

KEGIATAN FORUM KELITBANGAN TAHUN 2018



Menteri Agama Republik Indonesia H. Lukman Hakim Saifuddin berjabat tangan dengan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta usai menandatangani MOU tentang Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama di damping Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung I Wayan Suambara, Wakil Ketua DPRD I Made Sunarta dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama dan Layanan Kementerian Agama Muharam Marzuki, Ph.D

Kemajemukan merupakan ciri khas bangsa Indonesia sebagaimana diabadikan pada simbol negara “Bhinneka Tunggal Ika”. Semboyan “berbeda-beda tetap satu jua” adalah filosofi bangsa, dijadikan landasan untuk menjadikan masyarakat Indonesia yang majemuk menjadi bangsa yang rukun dan damai. Bagi bangsa Indonesia kerukunan sangat penting karena Indonesia memang ditakdirkan Tuhan sebagai bangsa yang hidup dalam pluralitas dan keragaman etnis, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Tidak ada satu bangsa pun di dunia yang mempunyai sifat keragaman seperti bangsa Indonesia yang terdiri dari lebih tiga ratus suku bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda. Agama-agama besar dunia, yaitu Islam, Katolik, Kristen, di samping Hindu, Budha, dan Khonghucu terdapat di Indonesia. Peta kehidupan umat beragama di Indonesia berdasarkan data sensus Biro Pusat Statistik tahun 2010, terdiri dari penduduk beragama Islam sebesar 87,21%, Kristen 6,96%, Katolik 2,91%, Hindu 1,69%, Buddha 0,72%, Konghucu 0,05 dan lainnya 0,5%.

Kalangan ahli sosial berpandangan bahwa kemajemukan bangsa merupakan hal penting untuk diperhatikan, karena kemajemukan, selain merupakan potensi kekuatan, juga menyimpan potensi ketegangan

dan konflik yang dapat mengancam kehidupan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, pengelolaan kemajemukan yang baik (yang rukun) merupakan keniscayaan bagi sebuah bangsa majemuk, jika tidak ia akan menjadi penghalang bagi tumbuhnya bangsa yang kuat. Clifford Geertz mengemukakan bahwa kemajemukan dapat menjadi persoalan besar dalam kehidupan negara bangsa, yakni ketika masing-masing kelompok sulit berinteraksi, tidak memiliki konsensus bersama atas nilai-nilai dasar kenegaraan dan kebangsaan.

Jauh sebelum kondisi sekarang, kehidupan umat beragama di nusantara selama berabad-abad telah menjalin kehidupan yang rukun dan damai. Hingga paruh pertama dekade 1960-an kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia tetap terpelihara, tidak terjadi perang antar agama, bahkan tidak timbul problem yang menonjol. Kalaupun ada, umumnya problem tersebut dapat diatasi secara cepat dan diselesaikan lewat musyawarah. Oleh karena itu, sejarawan Arnold J. Toynbee pernah memberikan julukan kepada Indonesia dengan *The land Where the religions are good neighbors*.

Namun, pada paruh kedua dekade 60-an, problem-problem hubungan antarumat beragama mulai tampak mengemuka. Konflik berlatar belakang SARA terjadi di berbagai daerah dalam skala yang cukup besar. Bermula pada awal Orde Baru, yakni pasca penumpasan G30 S PKI muncul situasi perselisihan umat Islam dan Kristiani yang chaotic dimulai dengan isu “kristenisasi” terhadap umat Islam, diikuti dengan perendahan atau pelecehan agama, seperti penghinaan nabi Muhammad di Makasar. Indikator tajamnya perselisihan tersebut, ditandai saling perusakan rumah-rumah ibadah dan gedung bersimbol agama, seperti perusakan gereja di Makasar dan Meulaboh. Sebaliknya, di Sulawesi Utara dan Ambon terjadi pembakaran masjid oleh para penganut Kristen. Peristiwa perusakan lain, terjadi di Slipi (Jakarta Barat); Menado; Flores; gedung Trakanita (Jakarta); rumah sakit Emmanuel Bukittinggi dan di beberapa tempat lain yang menunjukkan pertentangan atau ketegangan tinggi antara kelompok agama terjadi pada akhir tahun 1960- an.

Menyadari adanya ancaman desintegrasi bangsa karena berbagai persoalan kemajemukan, pemerintah Orde Baru sejak tahun 1970-an melakukan usaha pembinaan kerukunan umat beragama lebih “serius”, yakni memasukkan program kerukunan ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Penjabaran kerukunan dilakukan secara rutin tiap tahun lewat berbagai proyek kerukunan. Selama puluhan tahun kebijakan Orde Baru ini dijalankan, hasilnya adalah kerukunan umat beragama di Indonesia terlihat semakin baik, dan Indonesia sempat mendapat pengakuan dan penghargaan dunia dalam bidang kerukunan dan keharmonisan hidup umat beragama. Indonesia sebagai negara dengan ciri kemajemukan beragama seringkali dijadikan model kehidupan beragama oleh negara-negara yang memiliki masalah berkaitan dengan keragaman agama.

Akan tetapi, saat menjelang berakhirnya kekuasaan Orde Baru pada dekade 1990-an, kembali



Bupati Badung memberi pengarahan pada Kegiatan Forum Kelitbang Tahun 2018

disaksikan berbagai konflik dan kerusuhan sosial bernuansa agama yang merupakan tragedi nasional dan mendapat sorotan dari dalam maupun luar negeri. Dari tahun 1990-an tercatat cukup banyak kasus konflik dan kerusuhan sosial yang terkait atau dikaitkan dengan masalah sosial keagamaan. Antara lain konflik di Sambas pada tahun 1996 dan 1998, konflik di Ambon dan Poso sejak tahun 1998, Bahkan letupan-letupan konflik dalam skala kecil, masih terjadi secara sporadis hingga era reformasi. Konflik dan kerusuhan sosial yang muncul kembali ini merupakan ujian terhadap kerukunan yang telah dibangun dan diagungkan selama Orde Baru, bahwa bangsa Indonesia sebagai bentuk model bangsa yang tenang, rukun, dan damai. Akan tetapi situasi yang berkembang belakangan terkait insiden-insiden di beberapa tempat, kembali mengundang pertanyaan, apakah Indonesia masih sebagai bangsa yang menyandang predikat yang tenang, rukun, dan damai.

Pertanyaan seperti ini belakangan kerap mengemuka di masyarakat, terutama di saat munculnya fenomena-fenomena intoleransi. Seperti isu tentang Kristenisasi dan Islamisasi sebagai sebuah isu lama, mengemuka kembali, bahkan menimbulkan ketegangan antarumat beragama sebagaimana terungkap dari hasil studi Puslitbang Kehidupan Keagamaan di Bogor tahun 2014. Fenomena lainnya adalah pertentangan masalah ajaran, pertikaian antar kelompok aliran, dan pendirian rumah ibadah yang masih berlanjut di berbagai tempat. Realitas tersebut, menunjukkan bahwa kerukunan bukanlah sebuah barang jadi atau suatu bentuk kondisi yang permanen. Kerukunan bergerak secara dinamis sesuai kondisi atau dinamika yang berkembang di masyarakat.

Kabupaten Badung merupakan salah satu wilayah di Provinsi Bali yang paling dinamis dan heterogen dari perspektif sosial-budaya-politik. Pemerintah Kabupaten Badung melakukan upaya yang serius dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Badung, dengan melakukan langkah-langkah antisipasi timbulnya konflik sosial, sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Salah satu misi Pemerintah Kabupaten Badung adalah memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama. Misi tersebut secara substansi berpedoman pada target capaian prioritas Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) pada poin Bidang Adat, Agama, dan Kebudayaan.



Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Kementerian Agama Muharam Marzuki, Ph.D bersama Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung I Wayan Suambara usai Penandatanganan Kerja Sama tentang Survey Penyusunan Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung

PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI SISTEM HOMECARE



oleh

Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp.S.(K).

Homecare adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal pasien yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit (Depkes, 2002). Kabupaten Badung dengan jumlah penduduk 630.000 dan proyeksi lansia dengan usia diatas 65 tahun sekitar 33.000 (terdiri dari laki 15.100 dan perempuan 17.900 jiwa), harapan usia hidup yang semakin meningkat akan menyebabkan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berusia lanjut, maka dengan adanya harapan hidup yang semakin meningkat ini akan menambah jumlah lansia yang ada di kabupaten Badung yang memerlukan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan termasuk melalui pelayanan kesehatan homecare. Sampai saat ini belum ada data tentang pasien/penderita yang memerlukan perawatan homecare di kabupaten Badung.

Jika dihubungkan dengan data yang ada terkait jumlah kunjungan pasien rawat jalan yang terbanyak pada tahun 2016 didominasi oleh penyakit metabolic unspecified seperti diabetes mellitus without complication (30,40%), diikuti oleh cerebral infarction/stroke (11,51%). Cerebral infarction/stroke merupakan salah satu penyakit yang sering terjadi pada pasien dengan usia lanjut

dan penyakit ini dapat menimbulkan gejala sisa berupa kecacatan lanjutan yang sering memerlukan perawatan lanjutan setelah pasien pulang dari rumah sakit serta memerlukan perawatan khusus berupa perawatan lanjutan di rumah/ homecare. Pelayanan homecare juga dapat berupa pelayanan berbasis promotif dan preventif, selain pelayanan pada penyakit kronis lainnya seperti pada kanker dan asuhan pada anak.

Stuart (1998) menjabarkan perawatan kesehatan di rumah sebagai bagian dari proses pemulangan (*discharge planning*), bagi klien yang sudah waktunya pulang dari rumah sakit. Perawatan di rumah ini biasanya dilakukan oleh perawat dari rumah sakit semula, dilaksanakan oleh perawat komunitas dimana klien berada, atau dilaksanakan oleh tim khusus yang menangani perawatan di rumah. Kebutuhan masyarakat akan layanan tersebut dapat terfasilitasi dengan adanya layanan homecare yang baik dan profesional dari perawat sebagai pelaku utama dalam layanan kesehatan ini.

Sherwen (1991) mendefinisikan perawatan kesehatan di rumah sebagai bagian integral dari pelayanan keperawatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu individu, keluarga dan masyarakat mencapai kemandirian dalam menyelesaikan masalah kesehatan yang mereka hadapi. Home care adalah pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, individu dan keluarga, direncanakan, dikoordinasikan, dan disediakan, oleh pemberi pelayanan, yang diorganisir untuk memberi pelayanan rumah melalui staf atau pengaturan berdasarkan perjanjian kerja atau kontrak (Warola, 1980), Dalam Perkembangan Modal Praktek Mandiri Keperawatan di Rumah. Oleh PPNI dan DEPKES).

Berdasarkan jenis masalah kesehatan yang dialami oleh klien, pelayanan keperawatan di rumah (homecare) di bagi tiga kategori yaitu :

- a. Layanan perawatan klien sakit
Keperawatan klien yang sakit di rumah merupakan jenis yang paling banyak dilaksanakan pada pelayanan keperawatan di rumah sesuai dengan alasan kenapa perlu di rawat di rumah melalui perawatan homecare.
- b. Layanan berbasis promotif dan preventif
Pelayanan atau asuhan kesehatan masyarakat yang fokusnya pada promosi dan prevensi.
- c. Pelayanan atau asuhan spesialisik yang mencakup pelayanan pada penyakit-penyakit terminal misalnya kanker, penyakit-penyakit kronis.

Berdasarkan Institusi Penyelenggara ada beberapa jenis institusi yang dapat memberikan layanan Homecare, antara lain:

a. Institusi Pemerintah

Di Indonesia pelayanan homecare yang telah lama berlangsung dilakukan adalah dalam bentuk perawatan kasus/keluarga risiko tinggi (baik ibu, bayi, balita maupun lansia) yang akan dilaksanakan oleh tenaga keperawatan puskesmas (digaji oleh pemerintah).

b. Institusi Sosial

Institusi ini melaksanakan pelayanan homecare dengan sukarela dan tidak memungut biaya. Biasanya dilakukan oleh LSM atau organisasi keagamaan.

c. Institusi Swasta

Institusi ini melaksanakan pelayanan homecare dalam bentuk praktik mandiri baik perorangan maupun kelompok yang menyelenggarakan pelayanan homecare dengan menerima imbalan jasa baik secara langsung dari klien maupun pembayaran melalui pihak ke tiga (asuransi).

d. Homecare Berbasis Rumah Sakit (Hospital Home Care)

Merupakan perawatan lanjutan pada klien yang telah dirawat di rumah sakit, karena masih memerlukan bantuan layanan keperawatan, maka dilanjutkan di rumah.

Visi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah memandirikan masyarakat untuk hidup sehat dengan misi membuat rakyat sehat. Untuk mewujudkan visi misi tersebut berbagai program kesehatan telah dikembangkan termasuk pelayanan kesehatan di rumah/homecare. Pelayanan yang berkualitas mempunyai arti bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, individu/keluarga haruslah baik, bersifat etis dan benar berdasarkan ilmu dan hukum yang berlaku. Hukum yang mengatur praktek kedokteran dan keperawatan telah tersedia dengan lengkap dan baik dalam bentuk undang-undang, Peraturan Menteri (Permen) kesehatan. Kabupaten Badung yang terbagi atas 6 wilayah kecamatan dan 62 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, dengan jumlah penduduk (2016) sekitar 630,00 ribu jiwa yang terdiri dari 312,30 ribu jiwa penduduk laki laki dan 308,70 ribu jiwa penduduk perempuan. Untuk mulai memikirkan dan membuat system tentang pelayanan homecare bagi masyarakat Badung untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat Badung. Hal ini juga dikaitkan dengan jumlah kunjungan pasien terkait jumlah kunjungan pasien rawat jalan yang terbanyak pada tahun 2016 didominasi oleh penyakit metabolic unspecified seperti diabetes mellitus without complication (30,40%), diikuti oleh cerebral infarction/stroke (11,51%). Cerebral infarction/stroke merupakan salah satu penyakit yang sering terjadi pada pasien dengan usia lanjut dan penyakit ini dapat menimbulkan gejala

siswa berupa kecacatan lanjutan yang sering memerlukan perawatan lanjutan setelah pasien pulang dari rumah sakit dan memerlukan perawatan khusus berupa perawatan lanjutan di rumah/homecare. Pelayanan homecare juga dapat berupa pelayanan berbasis promotif dan preventif, selain pelayanan pada penyakit kronis lainnya seperti pada kanker dan asuhan pada anak.

Untuk merealisasikan sistem pelayanan homecare di Kabupaten Badung diperlukan data awal terkait jumlah kasus yang memerlukan perawatan homecare, jenis jenis kasus/penyakit yang memerlukan perawatan homecare melalui Penelitian Pendahuluan



Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa Pada Saat Menjemput Pasien Kanker (Home Care) di Petang



Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa (Home Care)

PENGEMBANGAN PRODUK PERTANIAN BUNGA POTONG SEBAGAI PENUNJANG KEBUTUHAN HOTEL DAN RESTORAN KABUPATEN BADUNG



oleh
Prof. Dr. Ir. Nyoman Suparta, MS., MM.

Sejak jaman dahulu kala, bunga telah menjadi perhatian umat manusia di dunia. Bunga telah menjadi simbol pengungkapan rasa cinta, simpati, bakti, hormat, kebahagiaan, bahkan nuansa kemewahan. Karena itu, bunga senantiasa dicari dan dibudidayakan. Beberapa tahun terakhir, bunga potong yang juga disebut “florikultura”, telah menjadi salah satu perhatian penting dalam dunia pertanian, karena potensinya yang sangat besar, terutama nilai ekonomi.

Kebutuhan pasar bunga potong dalam negeri Indonesia semakin meningkat, karena meningkatnya kesadaran masyarakat, meningkatnya konsumsi hotel, rumah sakit, rumah makan, mall dan lainnya. Permintaan bunga potong semakin meningkat terutama menjelang hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun baru, hari valentin, sehingga bisa jadi kekurangannya supply bunga potong. Karena itulah, produksi bunga potong terus digalakkan oleh pemerintah.

Pada dasarnya, berbagai jenis tanaman bunga dapat dikembangkan di Indonesia atau pun di Bali, karena ditunjang oleh kondisi iklim sejuk di dataran tinggi, kesuburan tanah, dan terutama potensi pasar yang sangat menjanjikan. Namun demikian, belum semua jenis bunga potong yang dibutuhkan masyarakat dapat dikembangkan di Bali.

Karakter pasar bunga di Bali memiliki kekhasan yaitu kebutuhan pasar domestik untuk bunga sebagai perlengkapan upacara/upakara. Kebutuhan bunga untuk upacara berlangsung sepanjang tahun dan meningkat signifikan pada hari-hari raya Hindu. Beberapa jenis bunga potong yang paling banyak dibutuhkan di Bali adalah bunga anggrek, anthurium, heliconia, krisan, mawar, sedap malam, phylodendron, dan gumitir.

Permintaan bunga potong di Bali akan terus meningkat seiring berkembangnya pariwisata dan kesadaran masyarakat akan pentingnya bunga. Hotel dan restoran senantiasa membutuhkan bunga potong yang cukup besar untuk hiasan maupun tanda penghargaan kepada para tamu yang telah mengunjunginya. Disisi lain, sebagian besar bunga potong yang dibutuhkan oleh pasar potensial di Kabupaten Badung masih didatangkan dari luar Badung. Kesenjangan tersebut, mendorong perlunya dikembangkan produksi bunga potong di Bali khususnya Kabupaten Badung baik kuantitas, kualitas maupun ragamnya.

Secara umum, bunga potong memiliki syarat tumbuh yang hampir sama, yakni: (a) adanya sinar matahari yang memadai, (b) suhu udara 17oC – 30oC, (c) curah hujan dan kelembaban udara yang cukup, dan (4) medium tanah yang ideal (tanah subur, gembur, dan drainase yang baik. Namun demikian, masing-masing bunga potong juga memiliki persyaratan teknis spesifik yang harus dipenuhi agar dapat berproduksi maksimal. Kabupaten Badung memiliki wilayah yang “agroklimat” tanahnya cocok atau mirip dengan persyaratan tumbuh bunga potong tersebut, sehingga sangat mungkin untuk dikembangkan.

Menyikapi kondisi tersebut, diperlukan kajian yang mendalam tentang persoalan bunga potong yang menyangkut kebutuhan bunga potong, upaya memproduksinya, dan jaminan kepastian pasar dan harganya agar dapat menguntungkan atau meningkatkan pendapatan petani. Dari berbagai sumber dapat dirumuskan bahwa bunga potong adalah satuan bunga yang dipotong dari tanaman induk dan dimanfaatkan sebagai bahan rangkaian bunga untuk berbagai keperluan, mulai dari kelahiran, perkawinan, dan kematian. Bunga potong juga merupakan setangkai atau lebih bunga, yang dikemas sesuai dengan permintaan pasar atau konsumen untuk hand bouquet, krans, vas meja ataupun bouquet (Andiani, 2013).

Produksi adalah semua kegiatan yang meningkatkan nilai kegunaan atau faedah (utility) suatu benda. Dalam pengertian lain kegiatan produksi merupakan berbagai kombinasi input untuk menghasilkan output (Suparta, N. 2010).

Bali merupakan daerah yang membutuhkan cukup banyak bunga potong. Bunga banyak diperlukan untuk kebutuhan hubungan sosial dalam daur hidup manusia mulai dari kelahiran, perkawinan, dan kematian; kebutuhan komersial seperti hotel dan restoran; serta kebutuhan upacara agama. Sebagai daerah pariwisata, Bali membutuhkan banyak bunga potong untuk menghias ruang kantor depan (front office), ruang penerimaan tamu, kamar-kamar hotel,

ruang rapat atau ruang seminar, dan lain sebagainya. Bunga potong juga diperlukan dalam bentuk vas bunga terutama meja rapat dan meja restoran atau rumah makan.

Kebutuhan hotel dan restoran terhadap bunga potong sangat besar. Karena itu, diperlukan upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan bunga potong tersebut yang bersumber dari produksi para petani yang dibina secara khusus di Kabupaten Badung. Badung memiliki potensi menjadi konsumen bunga potong yang sangat besar dan terbesar di Bali. Faktanya adalah, sebagian besar bunga potong dan bunga upakara dipenuhi dari kabupaten lain di Bali, bahkan banyak yang didatangkan dari luar Bali. Karena itu, Kabupaten Badung perlu mempunyai upaya khusus untuk mengembangkan tanaman bunga potong maupun tanaman upakara pada para petani, khususnya di daerah kecamatan Petang dan Abian Semal yang memiliki iklim sejuk dan tanah yang cukup subur.

BPS Provinsi Bali (2017), melaporkan bahwa diantara kabupaten di Bali, Kabupaten Badung merupakan Kabupaten yang paling banyak memproduksi bunga potong. Beberapa bunga potong yang telah diproduksi di Kabupaten Badung antara lain adalah (a) bunga anggrek 65.552 tangkai, (b) bunga anthurium 33.375 tangkai, (c) gerbera (herbras) 7.880 tangkai, (d) krisan 125.165 tangkai, (e) mawar 4.025 tangkai, (f) sedap malam 8.112 tangkai, (g) adenium (kamboja jepang) 200 pohon, dan (h) phylodendron 31.385 pohon.

Dari sederetan nama-nama bunga yang telah disebutkan di Kabupaten Badung diatas, belum tampak adanya bunga potong anyelir dan bunga potong gladiol, padahal kedua jenis bunga potong tersebut sangat terkenal dan harganya pun lumayan mahal. Karena itu, kedepan Kabupaten Badung perlu merintis perkembangan produksi bunga potong tersebut. Persyaratan teknis pertumbuhan bunga anyelir dan gladiol kelihatannya dapat dipenuhi oleh Kecamatan Petang.

Luas wilayah yang ada masih cukup untuk memenuhi kebutuhan bunga potong di Kabupaten Badung. Lebih lanjut, Badung bisa saja bekerjasama dengan daerah lain seperti Pancasari dan Baturiti serta Kintamani untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih besar. Produk pertanian pada umumnya tidak dapat disalurkan langsung kepada konsumen, karena: (a) kurangnya sumber keuangan produsen buat memasarkan langsung, dan (b) keinginan petani untuk lebih fokus dalam berproduksi. Pemasaran produk pertanian membutuhkan lembaga pemasaran yang lebih kuat. Hasil pertanian umumnya mudah rusak dan juga mudah busuk,

sehingga perlu pengelolaan (pasca panen), penyimpanan dan pengolahan yang sesuai agar produksi barang pertanian tidak terbuang dengan percuma. Karena itu, diperlukan kerja keras bersama untuk dapat memberikan kepastian pasar bagi petani.

Potensi pasar bunga potong yang besar di Kabupaten Badung harus dapat dimanfaatkan oleh petani produsen untuk menjadi pembeli yang pasti. Dalam upaya mewujudkan kepastian pasar dan harga itulah dibutuhkan peran pemerintah perda yang akan dibuat khusus untuk itu. Untuk mencapai harapan petani, perlu pula peningkatan sikap profesionalisme petani bunga potong itu sendiri dalam berbisnis. Petani harus mampu menyiapkan bunga potong sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Karena itu, petani bunga potong harus banyak belajar untuk meningkatkan kemampuan-kemampuannya baik dalam berproduksi maupun penanganan pasca panen, agar kualitas dan kuantitas bunga potong dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Keberhasilan dalam pemasaran komoditas pertanian akan memberikan jaminan harga produk pertanian, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku pertanian. Pemasaran produk pertanian merupakan unsur penting untuk mengubah dan menyalurkan komoditi dari titik produsen ke titik konsumen, dalam kegiatan ini akan diperoleh manfaat dan produktivitas pada setiap kegiatannya. Perolehan yang didapatkan nilai tambah tersebut merupakan variabel penggerak dalam proses pertumbuhan ekonomi kedepannya (Sukartawi, 1993).

Pemda Badung hendaknya jangan membuang kesempatan potensi bisnis bunga potong yang dimiliki oleh daerah Badung untuk menyejahterakan masyarakatnya secara mandiri. Pemda Badung dapat memfasilitasi produksi dan pemasaran bunga potong yang diproduksi oleh para petaninya. Selain itu Pemda Badung diharapkan dapat membuat kebijakan dan regulasi pemasaran produk bunga potong melalui Perda, sehingga sinergisitas sektor pertanian dan sektor pariwisata dapat diwujudkan.



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta Membuka Discovery kemerdekaan Flower Festival

PELUANG INVESTASI DI BIDANG PERBANKAN MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG



Oleh
Prof. Dr. I Wayan Ramantha

Kabupaten Badung merupakan daerah yang mempunyai potensi yang cukup strategis baik bagi kehidupan masyarakat Bali maupun di luar Bali pada umumnya. Potensi yang dimiliki antara lain sumber daya alam material maupun imaterial seperti budaya, adat istiadat dan sumber daya manusia sebagai subyek Pembangunan. Letak Kabupaten Badung yang sangat strategis dari aspek Geografis yaitu merupakan pintu masuk Pulau Bali dan sebagai jalur penghubung utama melalui jalur udara. Keseluruhan potensi tersebut bila di kelola secara berdaya guna berhasil guna dapat mempercepat pembangunan perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung.

Luas Kabupaten Badung 418,52 km² atau 7,43% dari luas daratan pulau Bali dengan jumlah Penduduk 476.933 ribu Jiwa (proyeksi Tahun 2018). Struktur perekonomian di Kabupaten Badung terbagi atas tiga kelompok sektor utama

yaitu Sektor primer yang terdiri dari pertanian dalam arti luas, sektor skunder yang terdiri dari industri, listrik dan air minum, bangunan, dan sektor tersier terdiri dari perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, perbankan dan lembaga keuangan lainnya dan jasa-jasa. Berdasarkan data BPS Tahun 2016 bahwa kontribusi pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari kelompok sektor masih didominasi dari sektor tersier dengan besaran 68,11% sedangkan pada urutan kedua dari kelompok sektor sekunder dengan besaran 16,53% dan disusul oleh kelompok sektor primer sebesar 14,65%. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung sebesar 7,64 persen tahun 2012, sebesar 6,82 persen tahun 2013, sebesar 6,97 persen tahun 2014, sebesar 6,27 persen tahun 2015 dan 6,42 persen tahun 2016.

Sektor pariwisata sangat berperan dalam pembentukan besaran Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi Badung. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai tambah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang pada tahun 2015 saja telah mencapai Rp 11,79 triliun. Dari seluruh nilai tambah itu, sub katagori penyediaan akomodasi memberikan kontribusi sebesar 73,42 persen. Sebagai perbandingan pada tahun 2015 besaran PDRB Kabupaten Badung atas dasar harga konstan Rp 29,18 triliun. Sedangkan atas dasar harga yang berlaku PDRB Kabupaten Badung pada periode yang sama mencapai Rp 41,28 triliun.

Posisi keuangan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami peningkatan, terbukti bahwa pada tahun 2012 ke tahun 2016 meningkat rata-rata sebesar 21,1%. Rasio tersebut menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam memberikan kontribusi pajak daerah terbilang cukup baik. Kondisi tersebut memerlukan inovasi-inovasi untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pemerintah. Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, di Kabupaten Badung sampai saat ini sangat banyak memiliki UMKM yang bergerak dalam berbagai jenis usaha. Permasalahan klasik yang dihadapi UMKM secara umum adalah keterbatasan modal usaha, dan rendahnya *asesibility* permodalan.

Salah satu langkah untuk menyelesaikan permasalahan permodalan UMKM serta menopang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung adalah dengan membangun sarana dan prasarana pendukung permodalan masyarakat, seperti Lembaga Keuangan sebagai lembaga intermediasi keuangan masyarakat. Sampai saat ini (data tahun 2017) di Kabupaten Badung selain terdapat Lembaga Keuangan/ Bank Pemerintah (BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN) dan Bank Swasta sebanyak 48 kantor Cabang, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang meliputi 455 unit Kopersai, 122 unit Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan 52 Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

BPR yang ada di Kabupaten Badung adalah BPR yang dimiliki/dikelola oleh Swasta. Di beberapa daerah Kabupaten yang ada di Bali yang telah memiliki BUMD khususnya sektor perbankan yang memadai terbukti telah mampu mendongkrak pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat ditambah lagi multiplier efek yang ditimbulkan dari keberadaan BPR dimaksud. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang otonomi daerah sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.0.3/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, yang disebutkan dalam salah satu pasal 17 huruf a. Memperhatikan diperluasnya kewenangan daerah dalam mengelola potensi dan keuangan daerah, maka dipandang perlu adanya kajian untuk kelayakan pendirian BPR di Kabupaten Badung yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses permodalan UMKM dan keuntungan bagi masyarakat serta bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung itu sendiri. Peluang investasi perbankan dalam hal ini pendirian BPR oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung diidentifikasi dari analisis.

Kekuatan

1. Mayoritas Saham dimiliki Pemerintah Daerah

Kondisi ini menjadi kekuatan permodalan untuk operasionalnya serta kepercayaan masyarakat baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan kredit. Kekuatan Permodalan dalam oprasional BPR akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga bermanfaat bagi BPR dalam menghimpun dana maupun menyalurkan kredit.

2. Sebagai pemegang Kas Pemerintah Daerah

menjadikan kekuatan sumber dana BPR Kabupaten, dimana bisa menggunakan kas iddel yang belum ditempatkan sebagian di BPR. Dapat menjadi media penyimpanan kas iddel yang dimiliki pemerintah daerah.

3. Lokasi Kantor PT BPR Badung

dipilih yang paling strategis sesuai dengan potensi bagian pasarnya. Di samping itu dengan kekuatan modal yang memadai BPR Badung juga bisa membuka cabang dan kantor-kantor kas di seluruh kecamatan yang potensial.

Kelemahan

1. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

BPR perlu didukung dengan permodalan eksternal yang kuat. Walaupun BPR dimiliki oleh Pemerintah Daerah, mengingat fasilitas pelayanan BPR yang

terbatas, seperti tidak memiliki ATM, sehingga akan mengurangi animo masyarakat untuk menabung atau menempatkan deposito di BPR. Di samping itu jumlah lembaga keuangan yang sudah ada di Kabupaten Badung saat ini sudah cukup banyak.

2. Peningkatan Efisiensi BPR

Sekalipun kinerja BPR secara umum di Bali cukup baik berdasarkan indikator keuangan seperti ROA dan ROE, efisiensi BPR masih perlu ditingkatkan terutama dari sisi produktivitas SDM mengingat salah satu sumber inefisiensi BPR pada umumnya adalah rendahnya keterampilan dan profesionalisme SDM BPR. Hal ini menuntut pengkajian dan penerapan teknologi modern dan tepat guna, selain peningkatan profesionalisme perbankan (*core banking skills*) dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)

Berdasarkan Posisi BPR yang strategis tersebut, peluang keberadaan BPR di Kabupaten Badung sebagai berikut.

1. Keunggulan Komparatif

Dalam sistem keuangan di Indonesia, BPR memiliki keunggulan komparatif baik dibandingkan dengan Bank Umum maupun LKM non bank.

2. Potensi Pasar yang Besar

Kabupaten Badung memiliki peluang pasar yang sangat besar bagi BPR karena memiliki UMKM yang sangat banyak. Kecamatan Petang ternyata merupakan kecamatan yang memiliki luas yang paling besar dan menyimpan banyak potensi ekonomi yang hingga kini belum tergarap secara optimal.

3. Potensi Kerjasama Keuangan dengan Lembaga Lain

Peluang kerjasama keuangan BPR dengan berbagai lembaga lain sangat terbuka, terutama karena BPR adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan ketentuan perbankan, diawasi dan dibina oleh OJK.

4. Dukungan Kebijakan Pemerintah

Upaya Pemerintah sangat gencar untuk meningkatkan peran UMKM. Selain itu dan dikeluarkannya Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi (Inpres No.3/2006) menegaskan pentingnya pemberdayaan UMKM, khususnya dalam hal peningkatan akses UMK kepada sumber daya finansial.

Ancaman

1. Persaingan yang lebih ketat di masa depan

Sejalan dengan bertambahnya lembaga-lembaga keuangan yang juga memberikan pembiayaan kepada UMKM, persaingan di masa depan dalam pembiayaan kepada UMKM akan semakin meningkat. Persaingan tersebut dapat terjadi dengan Bank Umum yang mengembangkan unit-unit pelayanan mikro, LKM non-bank dan lembaga penyalur dana bergulir yang didukung oleh Pemerintah. Persaingan juga muncul sebagai akibat dari penyaluran dana donor, pemerintah dan BUMN

secara langsung melalui proyek atau secara tidak langsung melalui Bank Umum dan/ atau koperasi. Terkait dengan persaingan tersebut di atas, BPR dituntut untuk mencari dan membuka pasar baru yang tidak terlayani Bank Umum dan pesaing di atas serta mengembangkan hubungan dengan nasabah yang berkesinambungan.

2. Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) dewasa ini menjadikan produk perusahaan cepat ditinggalkan oleh konsumen, demikian juga bagi BPR sebagai lembaga perbankan harus syarat dengan TI dalam operasionalnya. Antisipasi terhadap perkembangan TI menyebabkan BPR harus selalu mengupdate penggunaan TI sesuai dengan perkembangan jaman. *Sistem* pelayanan bank umum seperti SMS banking, *Internet banking* menjadi ancaman bagi produk dan pelayanan BPR

Dalam pendirian BPR yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, sebaiknya didasari dengan studi kelayakan yang mendalam menyangkut segala aspek yang diperlukan. Rancangan Peraturan Daerah mengenai pendirian BPR ini juga perlu dipersiapkan seiring dengan dimulainya kajian akademis yang diperlukan.



KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BADUNG YANG BERKELANJUTAN



Oleh :
Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., MH.

Kondisi Lingkungan Hidup di Bali pada umumnya dan di Kabupaten Badung sampai saat ini dapat disaksikan masih memerlukan optimalisasi tindakan-tindakan perlindungan dan pengelolaan yang ramah oleh Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Hal ini sebagai konsekuensi pelaksanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat telah diiringi oleh tekanan terhadap kemampuan daya dukung dan daya tampung sumber daya di Kabupaten Badung. Antara pembangunan dengan Lingkungan Hidup tidak dapat dihindari saling mempengaruhi dan mempunyai hubungan yang bersifat “ambivalen”. Disamping dampak positifnya, pembangunan di Kabupaten Badung selama ini juga telah membawa serta dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup, antara lain adalah terjadinya perubahan fungsi lahan akibat pertambahan penduduk, kegiatan usaha, pencemaran air, eksploitasi secara berlebihan terhadap sumber

daya alam yang tak terbarui, semakin menipisnya keanekaragaman hayati.

Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah melahirkan adanya kewenangan yang cukup luas kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola Lingkungan Hidup di wilayahnya. Dalam kaitan itu, pemberian otonomi dalam pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan peluang sekaligus tantangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung untuk mampu memberikan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayahnya menuju pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini perlu dibangun kebijakan yang mampu mendorong berkembangnya kreatifitas maupun inovasi aparat pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat untuk mampu melaksanakan program-program pembangunan di daerah yang ramah lingkungan. Dalam kaitan ini, maka kajian terhadap kebijakan yang idealnya dikembangkan Pemerintah Kabupaten Badung didalam memberikan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan menjadi menarik dan aktual untuk dilakukan.

Pokok-pokok pikiran ini disusun sebagai hasil riset yang diklasifikasikan dalam penelitian hukum normatif berdasarkan bahan-bahan hukum yang terkait. Dengan kata lain, pokok-pokok pikiran ini didasarkan pada hasil penelitian kepustakaan, baik terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Mengenai pendekatan yang akan diterapkan dalam penyusunan pokok-pokok pikiran ini dilakukan melalui pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan undang-undang (statuta approach). Pendekatan konseptual diterapkan untuk menemukan beberapa pengertian yang dibutuhkan terkait penjelasan beberapa persoalan yang dikaji dalam pokok-pokok pikiran ini. Selanjutnya pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk mendapat ketentuan hukum yang melandasi beberapa kajian dalam pokok-pokok pikiran ini.

Sebagai bahan hukum primer dalam penyusunan pokok-pokok pikiran ini berasal dari penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan, seperti UU No. 32 Tahun 2009 serta UU No. 23 Tahun 2014. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain diperoleh dari bahan pustaka di bidang Hukum Administrasi Negara, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Lingkungan yang berkaitan dengan teknis dan substansi pokok-pokok pikiran ini. Sementara itu, tehnik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penyusunan pokok-pokok pikiran ini adalah melalui tehnik telaahan kepustakaan (study document). Hasil penerapan tehnik telaahan kepustakaan itu selanjutnya dilakukan interpretasi, sistematisasi, evaluasi serta dianalisis isinya (content analysis).

Hakikat Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selanjutnya Pasal 33 ayat (3)

menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal ini menunjukkan hak atas Lingkungan Hidup yang baik merupakan bagian dari hak asasi manusia dan pada tingkatan tertinggi, negara memiliki kewajiban untuk menguasai sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal itu, perlindungan dan pengelolaan untuk terwujudnya Lingkungan Hidup yang baik dan sehat menjadi tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah seerta didukung oleh semua pihak terkait.

perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup pada hakikatnya merupakan upaya untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup mulai dari kegiatan perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan sampai pada pengendaliannya. Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hal ini didasarkan pada prinsip pelestarian “fungsi Lingkungan Hidup” dan dilakukan melalui pendekatan terpadu dengan penataan ruang maupun perlindungan unsur-unsur Lingkungan Hidup lainnya. Kebijakan dan tindakan pelestarian Lingkungan Hidup beserta fungsinya sejalan dengan tujuan pengelolaan Lingkungan Hidup baik dalam tataran lokal, nasional, maupun global. Tujuan pengelolaan Lingkungan Hidup pada esensinya adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berbasis berkearifan lokal untuk membangun manusia seutuhnya. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya mengandung dua konsep pokok. Pertama adalah konsep needs (kebutuhan), terutama kebutuhan dari rakyat miskin di dunia yang memerlukan prioritas penanganan. Kedua adalah keterbatasan (limitations) kemampuan Lingkungan Hidup dalam memenuhi kebutuhan manusia sekarang maupun yang akan datang.

Sementara itu dalam membangun manusia seutuhnya, Emil Salim mengemukakan ada 3 (tiga) cirinya, yakni tercipta adanya “keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan Maha Pencipta, keselarasan hubungan individu dengan masyarakat, dan keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan alam”. Konsep pembangunan manusia seutuhnya dalam visi Pemerintah di Kabupaten Badung dikenal dengan pembangunan manusia bernafaskan filosofis Tri Hita Karana. Oleh karena itu, tujuan akhir dan tujuan antara dari penyelenggaraan pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung pada hakikanya untuk menciptakan manusia seutuhnya melalui pembangunan berwawasan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

Urusan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai urusan yang bersifat concurrent akan dijumpai bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan

yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang concurrent secara proporsional antara Pemerintah, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota maka diperlukan adanya penegasan kriteria yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan.

Kabupaten Badung sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bali dengan luas wilayah 420,1 km² memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dan padat. Konsekuensinya, permasalahan Lingkungan Hidup tidak dapat dihindari terjadinya di Kabupaten Badung seperti persoalan degradasi sumber daya alam, permasalahan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan kawasan pesisir dan pantai, tekanan terhadap rencana tata ruang wilayah, serta degradasi kualitas kependudukan. Salah satu persoalan konkret yang sampai saat ini merupakan permasalahan yang belum dapat ditangani secara tuntas oleh Pemerintah Kabupaten Badung terkait dengan persoalan limbah dan sampah sehingga mengganggu industri pariwisata. Menyadari akan persoalan yang dihadapi, maka ditetapkanlah Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 adalah “Kabupaten Badung yang Damai dan Sejahtera berlandaskan falsafah Tri Hita Karana”. Adapun yang dimaksud dengan indikator “Damai” dalam visi tersebut adalah keadaan aman, tentram, rukun, tidak ada kerusuhan dan tidak ada peperangan. Indikator “Sejahtera” diartikan dengan keadaan makmur dan serba berkecukupan atas kebutuhan dasar manusia.

Sementara itu, indikator “Tri Hita Karana” diartikan dengan adanya kehidupan berlandaskan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan. Dengan demikian, secara keseluruhan mengenai visi dari Pemerintah Kabupaten Badung diartikan dengan keinginan mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung yang aman, tentram, rukun dan makmur berlandaskan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, salah satu misi yang ditetapkan adalah “Mewujudkan lingkungan yang asri dan lestari”. Hal ini tentunya menjadi dasar perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung dalam mewujudkan adanya Lingkungan Hidup yang baik dan sehat di daerahnya.

Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka melaksanakan urusan concurrent di bidang

Lingkungan Hidup, telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22). Secara kelembagaan juga telah dibentuk Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung yang diatur melalui Peraturan Bupati Badung No.35 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Badung jo. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Adapun visi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Terwujudnya Kelestarian Fungsi Lingkungan Dalam Menunjang Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Dijiwai Tri Hita Karana”.

Sementara itu, misi yang dikembangkan adalah :

1. Mewujudkan peningkatan pengawasan, pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan.
3. Mewujudkan peran serta masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Mewujudkan penerapan penataan hukum Lingkungan Hidup guna meminimalkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.
5. Mewujudkan peningkatan koordinasi dalam pengawasan permasalahan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Badung dalam mewujudkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat tidaklah dapat melakukannya sendiri. Pemerintah Kabupaten Badung melalui instansi terkait seperti instansi pengelola Lingkungan Hidup, kebersihan, perizinan, Satuan Polisi Pamong Praja, kepala Desa, serta Kepala lingkungan berkewajiban mengambil kebijakan untuk berperan proaktif responsif baik yang bersifat normatif maupun faktual. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menetapkan produk hukum jabsan yang lebih konkret dari UU No. 32 Tahun 2009 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 23 Tahun 2013 yang dapat dijadikan tolok ukur, pedoman perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi terhadap tindakan masyarakat dan/atau aparat pemerintah dalam melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup sesuai kebijakan,

kebutuhan, dan kondisi daerah, serta kebutuhan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah.

Sementara itu secara faktual (feitelijkhandelingen), dibutuhkan upaya Pemerintah Kabupaten Badung untuk melakukan penegakan hukum secara tegas dan responsif. Dalam kaitan ini diperlukan kebijakan penegakan hukum yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Badung baik dalam kapasitasnya sebagai individu, kelompok, penguasa, maupun sebagai aparat pemerintah yang senantiasa ramah terhadap Lingkungan Hidup dan menyadari bahwa merusak dan/atau mencemarkan Lingkungan Hidup pada hakikatnya merupakan tindakan kejahatan untuk membunuh dirinya sendiri dan/atau orang lain secara diam-diam, perlahan namun pasti.

Budaya ramah Lingkungan Hidup berbasis berkearifan lokal sudah seharusnya melekat pada setiap pikiran, perkataan, dan/atau perilaku masyarakat maupun aparat pemerintah daerah. Dengan demikian, kebebasan dan kemandirian bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengupayakan kebijakan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayahnya baik secara normatif yang belum optimal saat ini sudah seharusnya segera ditingkatkan dan dioptimalkan melalui pemberdayaan masyarakat maupun aparat pemerintah daerah (law as a tool of social and bureaucratic engineering) untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Badung.



Hari pertama kerja, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta keruk sampah Pantai Kuta

REORIENTASI PARADIGMA BADAN LITBANG DARI “RESEARC AND DEVELOPMENT” MENJADI “RESEARCH FOR DEVELOPMENT”

(Kasus Program Prima Tani menjadi Program Simantri)



Oleh :
I.G.A.K. Sudaratmaja

Pada awal tahun 2009, saat di mana Gubernur Bali sedang gencarnya memperkenalkan visi pembangunan Bali Mandara (Maju-Aman-Damai-Sejahtera), perhatiannya juga tertuju pada sektor pertanian. Sejalan dengan visi Bali Mandara, maka sektor pertanian harus dibangun lebih maju yaitu dengan sentuhan inovasi/teknologi.

Sebagai seorang Kepala UPT Badan Litbang Pertanian (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian/BPTP Bali), merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan di daerah Bali. Sesuai dengan kebijakan Badan Litbang Pertanian, bahwa kehadiran BPTP di daerah diharapkan mampu menghasilkan paket teknologi spesifik lokasi, yang pada akhirnya diharapkan mampu mewarnai kebijakan pembangunan pertanian di daerah masing-masing,

Pada saat itu BPTP Bali memiliki hasil pengkajian dalam bentuk percontahan yang telah mendapatkan apresiasi dan pengakuan pusat (Kementerian Pertanian RI). Adapun percontohan tersebut adalah model Prima Tani (Program Rintisan dan Akselerasi Pemasaryakatan Inovasi Teknologi Pertanian). Di mana Prima Tani BPTP Bali saat itu merupakan salah satu model Prima Tani terbaik di Indonesia. Berbekal pengalaman ini, program Prima

Tani kemudian diperkenalkan kepada Gubernur Bali, yang ternyata mendapat respon yang sangat positif.

Setelah melalui beberapa tahapan, di antaranya presentasi dan juga kunjungan lapangan, maka Bapak Gubernur akhirnya berketetapan hati untuk mengadopsi model Prima Tani menjadi Program Simantri (Sistem Pertanian Terintegrasi), sebagai salah satu program unggulan Bali Mandara.

GAMBARAN MODEL PRIMA TANI

Sebagai percontohan, saat itu BPTP Bali memiliki beberapa model Prima Tani yang mewakili keragaman agroekosistem, seperti untuk Lahan Perkebunan (Dataran Tinggi) di Desa Bongancina dan Sepang (Buleleng), untuk Lahan Kering (Dataran Rendah) di Sanggalangit (Buleleng) dan Lahan Irigasi di Subak Guama (Tabanan).

Kritik dan keluhan terhadap minimnya inovasi lembaga reseach yang bisa diterapkan langsung oleh pengguna sudah sangat sering kita dengar, termasuk di antaranya hasil inovasi Badan Litbang Pertanian. Kebijakan untuk mendirikan UPT Badan Litbang Pertanian di daerah seperti BPTP, dengan indikator kinerja mampu merakit teknologi spesifik lokasi yang bermanfaat bagi daerah, adalah dalam rangka menjawab tantangan tersebut.

Adopsi dari inspirasi model Prima Tani menjadi program Simantri di Bali, merupakan bukti nyata adanya reorientasi paradigma Badan Litbang Petanian dari “reseach and development” menjadi “research for development”. Hal ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi juga harus diikuti dengan perubahan strategi diseminasi, dari “informing” menjadi “pembuktian nyata di lapangan”. Keberhasilan yang ditorehkan BPTP Bali ini, banyak mendapat atensi dan apresiasi, dalam berbagai bentuk.

Inti program Simantri adalah integrasi Tanaman-Ternak, yang disesuaikan dengan potensi agroekosistem wilayah. Integrasi Tanaman-Ternak memiliki hubungan fungsional saling ketergantungan, di mana masing-masing yaitu ternak dan tanaman memiliki hasil utama dan hasil sampingan (limbah). Dengan rekayasa teknologi, limbah tanaman dan ternak dikelola dengan pendekatan “zero waste”, sehingga secara total model ini mampu memberi nilai tambah ekonomi yang optimal.

Selain memberikan nilai tambah ekonomi, model integrasi Tanaman-Ternak juga mampu menumbuhkan keswadayaan masyarakat dalam bentuk “4 F” yaitu; (1) Food/pangan, dari hasil utama tanaman dan ternak; (2) Feed/pakan, dari limbah tanaman; (3) Fertilizer/pupuk, dari limbah ternak padat (kompos) dan cair (bio-urine), dan (4) Fuel/bahan bakar, dalam bentuk bio-gas.

Program Simantri yang berbasis integrasi Tanaman-Ternak, memiliki ciri : (1) berorientasi pada pertanian ekologis/berkelanjutan;

(2) mengoptimalkan potensi sumberdaya lokal; (3) berpeluang menghasilkan produk pertanian organik; (4) menumbuhkan peluang kerja baru yang beragam, dan (5) atraktif dan menarik karena didukung inovasi/teknologi. Di samping itu program Simantri juga sangat relevan dengan beberapa isu aktual saat ini, seperti : (1) program penanggulangan kemiskinan; (2) sebagai entry point Bali menuju Pulau Organik, dan (3) mendukung pariwisata yang berkualitas, yang ditopang dengan produk pertanian organik.

PENGUATAN PROGRAM

Sampai dengan akhir 2017, cakupan program Simantri di Bali telah mencapai sekitar 800 Unit, yang tersebar di 9 Kabupaten/ Kota. Jumlah ini cukup signifikan memberi dampak terhadap peningkatan populasi ternak khususnya Sapi, peningkatan produksi tanaman, rintisan tumbuhnya pertanian organik, pengolahan hasil tanaman dan ternak, tersedianya cadangan bahan bakar berupa bio-gas dan tumbuhnya industri pengolahan pupuk organik, baik padat (kompos) maupun cair (bio-urine).

Khusus untuk produksi pupuk organik, kelompok Simantri yang maju dan terpilih, ditetapkan sebagai pelaksana program Subsidi Pupuk Organik dari dana APBD Bali. Jumlah dana subsidi untuk tahun 2016 saja mencapai Rp. 10 milyar untuk 12.000 ton pupuk, yang disebarkan untuk areal 25.000 Ha. Penguatan program ini juga diwujudkan dalam bentuk Asuransi Ternak Sapi untukantisipasi resiko kematian Sapi pada program Simantri.

Penguatan program Simantri, selain didukung dari aspek teknis berupa inovasi, regulasi dan pembiayaan, juga didukung oleh kelembagaan yang permanen. Sejak Tahun 2017 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang secara khusus menangani Pertanian Terintegrasi. Dengan demikian tahapan penanganan program terlihat runtut dan holistik, mulai dari inisiasi, penumbuhan dan penguatan oleh tenaga pendamping, dan terakhir adalah pelembagaan. Penguatan program simantri akhirnya menunjukkan hasil yang optimal dengan diraihnya penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan-RB tahun 2017.

PENUTUP

Tidak banyak yang tahu, bahwa kehadiran program Simantri berawal dari model Prima Tani. Adopsi model dari skala Litbang tentu memerlukan berbagai tahapan untuk dapat diterapkan secara masal sehingga menjadi program unggulan daerah. Inspirasi dan pengalaman adopsi program seperti ini, tentu sangat relevan menjadi bahan pemikiran di Badan Litbang Kabupaten Badung. Penguatan Bumdes atau penguatan ekonomi masyarakat misalnya, dapat diinisiasi dengan model percontohan seperti ini.



KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI E-KINERJA



Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung I Wayan Suambara, SH., MM dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Badung I Wayan Weda Dharma yang juga dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung Dr. I Gede Wijaya sebagai narasumber Bimtek E-Kinerja sekaligus Mensosialisasikan Aplikasi Absensi kepada seluruh Perangkat daerah Kabupaten Badung.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung I Wayan Suambara, SH.,MM dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Badung I Wayan Weda Dharma sebagai narasumber Bimtek E-Kinerja sekaligus Mensosialisasikan Aplikasi Absensi kepada seluruh Perangkat daerah Kabupaten Badung.



Peserta Bimtek E-Kinerja dan Aplikasi Absensi kepada seluruh Perangkat daerah Kabupaten Badung.

RAPAT KOORDINASI BERSAMA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung I Wayan Suambara, SH., MM memimpin rapat koordinasi bersama lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Udayana Prof.Dr.Ir Gde Rai Maya Temaja,M.P Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Prof.Dr. I Made Arya Utama,SH.,MH Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana DR. I Nyoman Mahendra Yasa, SE.,M.Si, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung Ir. Dewa Made Suambara dan dihadiri Juga Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Badung membahas rencana kerjasama Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2018.

Nampak Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana Prof. Dr. Ir Gde Rai Maya Temaja,M.P Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Prof. Dr. I Made Arya Utama,SH.,MH, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana DR. I Nym Mahendra Yasa,SE.,M.Si, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung Ir. Dewa Made Suambara dan dihadiri Juga Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Badung A.A Wardika membahas rencana kerjasama Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2018.



Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung I Wayan Suambara, SH., MM memimpin rapat koordinasi bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

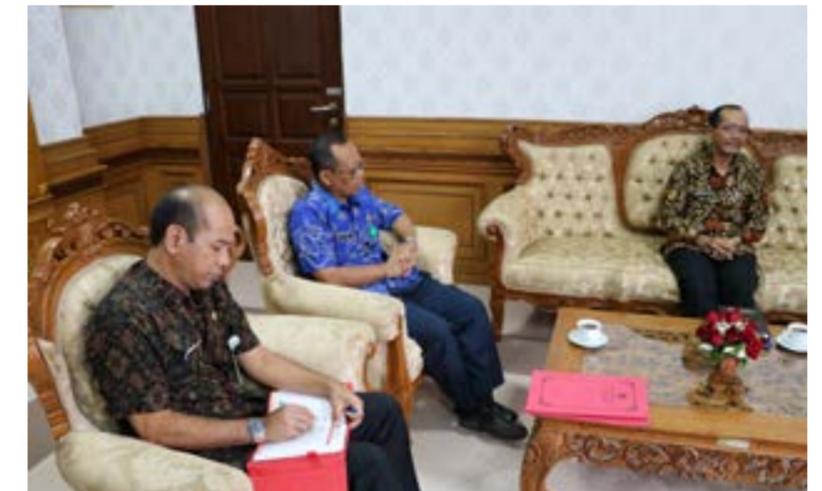


KUNJUNGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI



Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, I Nyoman Lastra, S.Pd, M.Ag melakukan kunjungan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Wayan Suambara Dalam rangka membangun kerjasama kelitbangan dibidang Kerukunan Umat Beragama

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung AA Manguningrat mendampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali I Nyoman Lastra, S.Pd, M.Ag dalam rangka membangun kerjasama Kelitbangan di Bidang Kerukunan Umat Beragama



Dalam rangka membangun kerjasama Kelitbangan dibidang kerukunan umat beragama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, I Nyoman Lastra, S.Pd, M.Ag didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung AA Manguningrat melakukan kunjungan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Wayan Suambara didampingi Kepala Bidang Sosial Ekonomi Pemerintah I Nyoman Adi Wiratma.



RAPAT KOORDINASI TIM KELITBANGAN

Peran Badan Litbang kedepan sangat penting dan strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Demikian penegasan Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa dihadapan Majelis Pertimbangan Kelitbangan dan Tim Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung.



Tampak Tim Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung pada rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa.

Peserta rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, dipandu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Wayan Suambara berhasil merumuskan arah dan kebijakan Kelitbangan Badung tahun 2019 s.d 2021 serta kegiatan yang akan diusulkan pada tahun 2019 dalam Musrenbang nanti. Saat ini Balitbang Badung telah memiliki Rencana Induk Kelitbangan (RIK) 2017-2021.



KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG MENUNJUKI UMKM PENGHASIL VIRGIN COCONUT OIL

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM di Kabupaten Badung, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung I Wayan Suambara didampingi Kepala Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintah I Nyoman Adi Wiratma mengunjungi Wayan Setiawan salah seorang Pelaku UMKM penghasil Virgin Coconut Oil.



Wayan Setiawan Pelaku UMKM penghasil Virgin Coconut Oil (VCO) menjelaskan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung I Wayan Suambara tentang produksi Virgin Coconut Oil (VCO)

Kabid Sosekper Komang Adi Wiratma mendampingi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung I Wayan Suambara pada kunjungan ke tempat produksi Virgin Coconut Oil (VCO)



KEGIATAN MANGUPURA AWARD

Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Wayan Adi Arnawa didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Badung Cok Raka Darmawan dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung I Wayan Suambara memimpin rapat persiapan Penilaian Mangupura Award sekaligus rapat koordinasi dengan Para Juri



Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Wayan Adi Arnawa Memimpin rapat persiapan Penilaian Mangupura Award sekaligus rapat koordinasi dengan Para Juri yang terdiri dari unsur BPKP, ORI, Universitas Udayana, Badan Perpustakaan dan arsip Provinsi Bali serta unsur Biro Organisasi Provinsi Bali.

Tampak Kepala Perangkat Daerah menyimak rapat persiapan Penilaian Mangupura Award yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Badung



PEMBUKAAN KEGIATAN FORUM KELITBANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

Menteri Agama Republik Indonesia H. Lukman Hakim Saifuddin membuka Forum Kelitbangan Kabupaten Badung Tahun 2018 di saksikan oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung Drs. I Made Sunarta, MM, Msi, Pelindung FKUB Kabupaten Badung AA Gde Agung, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung I Wayan Suambara dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Kementerian Agama Muharam Marzuki, Ph.D



Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung I Wayan Suambara berjabat tangan dengan Menteri Agama Republik Indonesia H. Lukman Hakim Saifuddin usai penandatanganan kerja sama Survey Penyusunan Indeks Kerukunan Umat Bergama di Kabupaten Badung

Usai Pembukaan Kegiatan Forum Kelitbangan Kabupaten Badung Tahun 2018 di tampak berbincang mantan Bupati Badung yang saat ini penasehat FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Anak Agung Gde Agung, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Menteri Agama Republik Indonesia H. Lukman Hakim Saifuddin, Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia Prof I Ketut Widnya di Loby Kantor Bupati Badung



STUDI KELAYAKAN INVESTASI PEMBANGUNAN HOTEL DI DESA KUTUH, KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG



Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung mendapat tugas menyusun studi kelayakan investasi pembangunan hotel di Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan di Kabupaten Badung

Peserta Rapat studi kelayakan investasi pembangunan hotel di Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan di Kabupaten Badung



Tim pengkaji dari Universitas Udayana beserta SKPD pada Rapat studi kelayakan investasi pembangunan hotel di desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan di Kabupaten Badung terkait bertempat di Badan Penelitian dan Pengembangan Kab Badung.

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BADUNG MENKAJI SISTEM PARKIR BERBASIS TEKNOLOGI



Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung I Wayan Suambara bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung Ketut Gede Suyasa memantau sistem Parkir berbasis teknologi. Idealnya Badung memiliki Perusahaan daerah Parkir, memiliki fasilitas parkir berbasis teknologi yg hemat lahan, maksimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Parkir dan Retribusi Parkir, dikelola secara profesional, masyarakat di Edukasi antara lain melalui Parkir meter dan Kota Surabaya sudah mulai menerapkannya.

Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Badung Cokorde Raka Darmawan bersama Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung I Wayan Suambara memantau Teknologi Parkir di Kota Surabaya



Foto Bersama usai mengunjungi teknologi Parkir di Kota Surabaya

RAPAT KOORDINASI MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN KABUPATEN BADUNG



Kunjungan Rektor Universitas Udayana Prof.Dr.dr Raka Sudewi ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah I Wayan Adi Arnawa beserta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung I Wayan Suambara dalam rangka sidang Majelis Pertimbangan Kelitbang Kabupaten Badung.

Rektor Universitas Udayana Prof.Dr.dr Raka Sudewi di dampingi Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., M.Hum Rapat Koordinasi Majelis pertimbangan Kabupaten Badung di Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.



Kunjungan Rektor Universitas Udayana Prof.Dr.dr Raka Sudewi ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung

PENELITIAN DAMPAK PEMBERIAN HIBAH UANG OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG KEPADA DESA ADAT DAN KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN BADUNG



Pembahasan Laporan Pendahuluan Penelitian Dampak Pemberian Hibah Uang oleh Pemerintah Kabupaten Badung Kepada Desa Adat dan kelompok masyarakat yang dilaksanakan oleh Balitbang Kabupaten Badung

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Badung Ida Bagus A. Yoga Segara serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung I Wayan Suambara dan Inspektur Insperktorat Ni Luh Suryaniti, SH memimpin Pembahasan Laporan Pendahuluan Hasil Penelitian Dampak Pemberian Hibah Uang oleh Pemerintah Kabupaten Badung Desa Adat dan kelompok masyarakat



Perangkat Daerah menyimak Laporan Pendahuluan Penelitian Dampak Pemberian Hibah Uang oleh Pemerintah Kabupaten Badung Desa Adat dan kelompok masyarakat.

KAJIAN EVALUASI PROGRAM KRAMA BADUNG SEHAT(KBS) DI KABUPATEN BADUNG



Wakil bupati Badung I Ketut Suiasa bersama Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung mendiskusikan laporan pendahuluan evaluasi kebijakan program Kajian evaluasi Krama Badung Sehat (KBS) yg dikerjakan oleh LPPM Universitas Udayana, di Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung. Banyak hal yang masih Harus ditangani untuk kesempurnaan pelaksanaannya demi kesinambungan program tersebut.



FORUM DISKUSI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN (JFAK)



Dalam rangka optimalisasi kinerja Kelitbang, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung melaksanakan Forum Diskusi tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) dengan menghadirkan narasumber Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN-RI Erna Irawati.

Pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Wayan Adi Arnawa mengapresiasi langkah Balitbang berkoordinasi dengan LAN dalam upaya rekrutmen pejabat fungsional analis kebijakan. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung mendorong agar Balitbang memiliki Analis Kebijakan dalam rangka memperkuat pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan. Sekretaris daerah Kabupaten Badung Wayan Adi Arnawa berjanji akan memberikan perhatian yang layak bagi mereka yang duduk sebagai pejabat fungsional analis kebijakan. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung I Wayan Suambara menargetkan dalam tahun 2018 ini jabatan fungsional tersebut sudah terisi dan berjanji akan mengawal semua proses tersebut bersama Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung. Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan LAN sangat mengapresiasi langkah Balitbang Badung dan mengatakan Kabupaten Badung merupakan Kabupaten yang pertama di Indonesia yang mengambil langkah tentang hal ini.



FOCUS GRUP DISCUSSION PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB BALI) 4 ANAK SEBAGAI USAHA MEMPERTAHANKAN KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN BADUNG

Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa, Rektor IHDN Denpasar Prof Dr. IGN Suidiana yang juga Ketua PHDI Bali dan Ahli Hukum adat Prof Dr Wayan Windia SH sebagai narasumber Pada Focus Grup Discussion Program Keluarga Berencana (KB BALI) 4 Anak Sebagai Usaha Mempertahankan Kearifan Lokal di Kabupaten Badung Bertempat di Ruang Rapat Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.



Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa didampingi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung I Wayan Suambara berbincang bersama Rektor IHDN Denpasar Prof Dr. IGN Suidiana Ketua PHDI Bali dan ahli hukum adat Prof Dr Wayan Windia SH di Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.

Focus Grup Discussion Program Keluarga Berencana (KB BALI) 4 Anak Sebagai Usaha Mempertahankan Kearifan Lokal di Kabupaten Badung.

